

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardjowahono, B. S. (2020). Dasar-dasar hukum perdata internasional. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2021). Hukum perkawinan nasional. Sinar Grafika.
- Indrati, M. F. (2023). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.
- Irianto, S. (2022). Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Koesnoe, M. (2018). Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini. Airlangga University Press.
- Mahlil, A., dkk. (2005). Hukum perdata. CV. Gita Lentera.
- Manan, B. (2022). Negara hukum dan hak asasi manusia. FH UII Press.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Pohan, M. (2008). Hukum orang dan keluarga. Universitas Airlangga.
- Prawirohamidjojo, S., & Pohan, M. (2021). Hukum orang dan keluarga. Airlangga University Press.
- Subekti, R. (n.d.). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Tutik, T. T. (2020). Hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Kencana.
- Wahyono, P. (2020). Indonesia negara berdasarkan atas hukum. Ghalia Indonesia.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Amnurdiant, F. A., & Nugroho, L. D. (2025). Perkembangan prinsip *lex loci celebrationis* dalam perkawinan campuran antarnegara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1398–1405.
- Awalin, H. F., Rasendriya, B. R., Mahira, A. H., Pramudita, S. S., Kusmaputri, R. I., Ardian, M., & Sakti, M. (2024). Implikasi pencatatan sipil akibat perbedaan asas kewarganegaraan yang dianut antar negara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Azkia, S. W., & Bahri, R. A. (2025). Implikasi hukum perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak: Studi normatif dan perbandingan hukum di Asia Tenggara. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(2), 24–41.
- Baihaki, A. (2023). Upaya pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Bengngu, J. G. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Akibat hukum mengenai status anak yang lahir dalam perkawinan campuran (Studi perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119–135.
- Budiarsih, D. (2022). Penegakan hak alimentasi anak lintas negara dalam perkawinan campuran: Hambatan dan solusi. *Jurnal Notarius*, 15(1), 211–228.
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191.
- Fanani, A. Z. (2020). Statelessness dan hak asasi manusia: Studi kasus anak perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(2), 183–200.
- Harensyah, B. D., Hidayat, F. R., & Nugroho, L. D. (2025). Implikasi perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran terhadap status hukum anak dalam perspektif hukum perdata internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2471–2481.
- Hasyim, A., & Pratiwi, R. (2023). Persoalan nama anak dalam perkawinan campuran: Dimensi administratif dan keperdataan. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 10(1), 45–74.
- Hermanto, B. (2024). Quo vadis pengaturan perkawinan campuran dalam bingkai pembenahan hukum kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 167–190.

- Hidayati, N., & Mulyadi, S. (2022). Ekosistem normatif perlindungan anak perkawinan campuran: Telaah harmonisasi peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 44–73.
- Kusuma, B., & Widjaya, A. (2023). Aksesibilitas BPJS kesehatan bagi anak berkewarganegaraan ganda: Tinjauan regulatif dan praktis. *Jurnal Hukum Kesehatan dan Bioetika*, 6(2), 78–107.
- Muryanto, Y. T. (2018). Permasalahan hukum waris dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 7(2), 289–307.
- Muthmainah, M. (2024). Perlindungan hukum hak keperdataan anak luar kawin. *Jurnal Hukum Inkracht*, 4(1), 19–19.
- Niken, U., & Linda, W. (2025). Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. *Jurnal Hukum*, 2(2).
- Nurhayati, S., & Prasetyo, D. (2023). Variasi praktik pencatatan kelahiran anak perkawinan campuran: Studi komparasi antar-daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 10(3), 119–148.
- Nurmaya, I., & Arifin, S. (2022). Putusan MK 46/2010 dan implementasinya dalam kasus anak perkawinan campuran yang tidak tercatat. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Keluarga*, 9(3), 200–229.
- Rejekiingsih, T. (2019). Kedudukan hukum anak berkewarganegaraan ganda terbatas dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 8(3), 412–425.
- Salsabila, L. A., Handayani, P., Nasution, S. A., Aini, S., Ndruru, B. Y., Fitra, R., & Rachman, F. (2023). Dampak kewarganegaraan ganda bagi warga Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 352–366.
- Sari, M., & Mahendra, B. (2022). Konflik hukum dalam waris lintas batas: Ketidadaan kodifikasi hukum internasional privat Indonesia dan dampaknya. *Jurnal Hukum Internasional dan Bisnis*, 9(1), 34–63.
- Sarohmah, S., Titian, F. A. T., Delysfa, A. A., Anisa, R., & Yenny, F. (2025). Analisis tantangan dan akibat hukum perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*.
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan campuran, pencatatan keabsahan pencatatan perkawinan di luar Indonesia

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kertha Wicaksana, 14(2), 139–146.

Sumantri, A. (2019). Tinjauan terhadap kedudukan anak dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan (Disertasi doktoral, Universitas Islam Riau).

Suryatni, L. (2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dalam melindungi hak perempuan dan anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

Wahyuningsih, T., & Kusuma, F. (2022). Pilihan pendidikan anak perkawinan campuran dan implikasinya terhadap perkembangan identitas. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Hukum*, 5(2), 44–73.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Iva Nielsen Ketua PerCa Perwakilan Jawa Tengah pada hari Kamis, 7 Mei 2026.